

ANALISIS VARIABEL PENGARUH PENERIMAAN PPN DAN PPnBM

Rika Mawarni, Tantri Kartika Sari, Yunita Duwi Anggiyasari.

[Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tulungagung]

ABSTRACT

PPN and PPnBM are one of big state revenue from the tax sector for the country. This study was conducted to determine whether the amount of PKP, GDP, exports, imports, inflation, consumption, interest rates, population, and whether all these variables have a joint effect on VAT and PPnBM receipts. Data collection techniques were carried out through desk review, collection, recording and review of secondary data. Data Analysis Techniques This study uses textual analysis techniques in analyzing qualitative data. The results showed that the total PKP, GRDP, total export value, total import value, total consumption, total population had a positive effect on PPN and PPnBM receipts. Meanwhile, inflation value and interest rates value have a negative effect on VAT and PPnBM receipts. All of the variables have a big and important effect on VAT and PPnBM receipts.

Keywords: *PPN and PPnBM, Total PKP, Total GDP, Exports Value, Imports Value,*

ABSTRAK

PPN dan PPnBM ialah salah satu sumber penerimaan negara yang besar dan berasal dari sektor pajak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah besaran PKP atau pengusaha yang terdaftar sebagai wajib pajak, jumlah dari produk domestik bruto negara, besaran ekspor dan impor, tingginya inflasi, besarnya konsumsi masyarakat, besarnya suku bunga lembaga keuangan, besarnya jumlah penduduk, serta apakah semua variabel tersebut mempunyai pengaruh bersama terhadap penerimaan PPN dan PPnBM. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui desk review, pengumpulan, pencatatan dan penelaahan data sekunder. Teknik Analisis Data yang digunakan yaitu teknik analisis tekstual dalam menganalisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total PKP atau pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai wajib pajak, jumlah keseluruhan produk domestik bruto negara, nilai ekspor dan impor, besarnya konsumsi, jumlah penduduk berpengaruh positif atas penerimaan PPN dan PPnBM. Sementara itu, inflasi dan suku bunga berpengaruh negatif atas penerimaan PPN dan PPnBM. Variabel secara simultan atau simultan berpengaruh signifikan atas penerimaan PPN atau pajak penjualan dan PPnBM atau pajak yang ditujukan atas penjualan berbagai barang mewah.

Kata kunci: *PPN dan PPnBM, Jumlah PKP, Jumlah Keseluruhan PDB, Nilai Ekspor dan Impor*

PENDAHULUAN

Pajak Penjualan atau disebut Pajak Pertambahan Nilai serta pajak yang ditujukan unttuk penjualan barang mewah atau PPnBM adalah pajak yang termasuk tidak langsung di Indonesia yang dikenakan atas konsumsi pada masing masing tingkat produksi atau distribusi. Meskipun Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah mengenai tingkatan produksi dan/atau distribusi barang atau jasa secara masing-masing, konsumen akhir menanggung pajak ini secara tidak langsung. Selain penerimaan hasil migas dan nonmigas, negara dapat menerima pendapatan dari pajak. Oleh karena itu, pajak ialah sumber penerimaan strategis yang harusnya dikelola dengan tepat. Dalam struktur keuangan negara, pemungutan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah pimpinan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Konteks penerapan pajak penjualan barang mewah diharapkan dapat mencerminkan pemerataan horizontal dan vertikal dalam setiap pemungutan pajak, termasuk pemungutan PPN. Supaya tercerminan keadilan, maka pemungutan pajak atas penjualan barang mewah diberlakukan sebagai tambahan.

Penerimaan negara dapat bersumber dari penduduknya melalui pemungutan pajak dan/atau hasil sumber daya alam.. Kedua akar ini telah dapat memberikan kontribusi yang baik dalam penyediaan penerimaan negara. Meskipun pajak PPN dan pajak PPnBM dikenakan sebagai tambahan yang timbul pada masing masing tingkat penciptaan barang/jasa dan penyalurannya, konsumen akhir secara tidak langsung menanggung pajak ini.

Menurut¹ Undang-Undang PPN dan PPnBM 2009, PPN ialah pungutan pajak sebagai nilai tambah yang diciptakan melalui penggunaan berbagai faktor produksi oleh pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai wajib pajak, dimana yang memproduksi serta menjual barang maupun jasa yang secara undang-undang masuk kedalam objek pajak. Sedangkan pajak yang membebani penjualan barang mewah atau PPnBM merupakan pajak yang dikenakan untuk berbagai barang dalam kelompok barang mewah. Dimana pengenaan PPnBM didukung oleh produsen yang memproduksi atau mengimpor barang tersebut. PPN merupakan pajak tidak langsung yang dibebankan kepada pihak lain. Tarif PPN bersifat objektif, yaitu kewajiban membayar PPN tergantung pada subjek pajak, sehingga kondisi subjek (jenis kelamin, kedudukan sosial atau daya beli) tidak akan menjadi faktor pertimbangan. Pajak pertambahan nilai disebut pajak yang berlapis karena pajak ini dipungut di seluruh rantai produksi dan distribusi. Semua barang dikenakan pajak penjualan, mulai dari produsen pusat barang tersebut hingga ke pengecer, semua dikenakan pajak penjualan.¹

PPnBM merupakan pajak tambahan yang dipungut atas penjualan barang mewah selain pungutan PPN. Tujuannya agar konsumen dengan daya beli tinggi yang membeli barang mewah menanggung tambahan pajak yang lebih besar dibandingkan konsumen lain dengan daya beli

tergolong rendah. Karena tanpa tambahan ini, berarti tidak ada prinsip keadilan dimana konsumen dengan daya beli tinggi membayar pajak dengan persentase yang sama dengan konsumen dengan daya beli rendah. PPnBM hanya sekali dikenakan, yaitu pada saat mengimpor barang yang tergolong mewah. Pengkreditan PPnBM tidak dapat dilakukan seperti pada PPN karena target PPnBM adalah konsumen. PPN dan PPnBM dapat memainkan peran yang penting dalam menghasilkan pendapatan bagi keuangan publik melalui pemungutan pajak. Oleh karena itu kami tertarik untuk meneliti berbagai variabel yang menyesuaikan penerimaan PPN dan PPnBM. Dalam studi ini, kami membahas dampak jumlah pengusaha yang termasuk dalam PKP, besarnya PDB, nilai ekspor dan impor, tingginya inflasi, tingkat konsumsi, tingginya suku bunga serta besar populasi penduduk, dan apakah semua variabel tersebut memiliki pengaruh yang sama atas pajak yang diterima nantinya.

KAJIAN TEORI

1.1 Pajak

Menurut² Prof. PJA Adriani, sebagaimana dilansir dalam artikel Kementerian Keuangan: "Pajak ialah iuran untuk Negara yang dapat dipungut dan terutang bagi mereka yang memiliki kewajiban untuk membayarnya berdasarkan undang-undang, tidak ada pengembalian manfaat yang ditetapkan langsung, dan tujuannya guna membiayai overhead yang berkaitan bersama tugas negara menyelenggarakan pemerintahan". Menurut² Undang-Undang Nomor 28 pada Tahun 2007 mengenai Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum serta Tata Cara Perpajakan, sebagaimana dalam laman Departemen Keuangan disebutkan bahwa pajak ialah suatu iuran wajib yang harus dibayar oleh pembayar pajak atau oleh penduduk ke negara yang didirikan oleh undang-undang, dan digunakan untuk menjalankan pemerintahan negara serta demi kebaikan dan kesejahteraan bersama.

1.2 Pengertian PPN

Menurut³ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengenai Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 mengenai Pajak pertambahan nilai dan barang mewah. Disebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang mengenai pada konsumsi dalam negeri, baik konsumsi barang kena pajak maupun jasa kena pajak. Menurut UU No 42 Tahun 2009, persen PPN yang ditetapkan sebesar 10% untuk seluruh jenis penyeteroran Barang Kena Pajak dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Serta pajak ekspor yang ditetapkan sebesar 0% untuk kegiatan ekspor barang ke luar. Pemerintah dapat mengubah besarnya persen pajak yang akan membebani barang tersebut paling sedikit sebesar 5%, sedangkan yang paling tinggi sebesar 15% dari setiap barang tersebut. PPN merupakan pajak

tidak langsung, dalam hal ini pajak tersebut dibayarkan oleh pedagang yang bukan merupakan wajib pajak. Pajak Pertambahan Nilai dalam luar negeri dalam pengenaannya disebut (VAT) atau (GST)⁴.

1.3 Pengertian PPnBM

Menurut³ Undang-Undang mengenai PPN dan PPnBM pada tahun 2009, PPnBM ialah pajak yang hanya akan membebani berbagai jenis barang yang termasuk mewah atau mahal. Dimana PPnBM ditanggung oleh pengusaha terdaftar wajib pajak yang memproduksi atau memasukkan barang mewah. PPN termasuk kedalam membebani pajaknya pada pihak lain.

Menurut⁵ Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja di Bidang PPh, PPN, dan PPnBM, serta Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, ini ialah pajak yang mengenai suatu barang jika barang tersebut termasuk mewah. Dimana pajak PPnBM ditanggung oleh pengusaha terdaftar wajib pajak yang memproduksi atau memasukkan barang mewah. PPN merupakan pajak yang membebani kepada pihak lain.

Menurut³ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, persen PPnBM minimal sepuluh persen serta maksimal dua ratus persen. Serta jika pengusaha mengekspor barang yang termasuk jenis barang mewah, dikenakan pajak dengan persen nol, pajak ini dikenakan atas barang yang tergolong barang mewah yang diproduksi oleh produsen atau pengusaha dengan tujuan untuk memproduksi atau mengimpor barang mewah tersebut dalam kegiatan komersialnya.

1.4 Pengusaha Kena Pajak

Menurut⁵ Permekeu tentang penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja di bidang Pajak Penghasilan, PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah, serta Ketentuan dan Tata Cara umum Perpajakan, dijelaskan bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah penawar BKP dan/atau JKP tunduk pada undang-undang PPN. Pengertian PKP tidak termasuk dalam kategori pemilik usaha kecil. Batasan bagi pengusaha yang termasuk dalam kategori PKP ditetapkan dalam Undang-Undang. Dengan pengecualian, kategori pengusaha kecil bersangkutan memiliki keinginan untuk melakukan pengukuhan sebagai PKP. Sedangkan untuk pengusaha non PKP yaitu pengusaha yang mana belum melakukan pengukuhan diri sebagai PKP. Maka dari itu, setiap hak yang didapatkan oleh PKP dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab oleh PKP juga tidak dapat dilakukan oleh seorang pengusaha dengan status non PKP.

Jika pengusaha non-PKP ingin melakukan pengukuhan sebagai PKP, yang bersangkutan harus mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat di wilayah yang bersangkutan.

Pendaftaran ini dilakukan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang digunakan sebagai identitas. Ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi sebelum seorang pengusaha melakukan pengukuhan sebagai PKP. Seorang pengusaha yang ingin menjadi PKP harus memiliki omzet dalam waktu 1 tahun yang telah mencapai nilai nominal lebih besar atau sama dengan Rp. 4.800.000.000. Sedangkan yang belum mencapai hingga Rp. 4,8 miliar tidak dapat dikukuhkan sebagai bagian dari PKP. Dimana kemudian, pengusaha termasuk dalam klasifikasi non-PKP dan pengusaha kecil. PKP yang penjualan bruto atau komersialnya kurang dari Rs 4,8 miliar per tahun dapat meminta pencabutan pembukaan sebagai PKP⁶.

Seorang pengusaha yang sudah melakukan pengukuhan sebagai PKP memiliki kewajiban untuk memungut PPN dan PPnBM terutang dari konsumennya. Pengusaha yang sudah menjadi PKP dan memungut PPN selanjutnya harus menyetorkan PPN dan PPnBM terutang yang kurang bayar. Selain memungut dan menyetorkan pajak terutang, PKP juga memiliki kewajiban untuk melaporkan dan menyampaikan SPT. Sedangkan Hak PKP (Pengusaha Kena Pajak) yaitu mendapatkan hak untuk melakukan pengkreditan PPN atas perolehan BKP atau JKP namun tidak dengan PPnBM karena PPnBM tidak bias dikreditkan seperti PPN. Pengusaha yang telah berstatus sebagai PKP juga bisa melakukan restitusi atau melakukan kompensasi atas sejumlah kelebihan PPN yang telah dibayarkan.

1.5 PDB (Produk Nasional Bruto)

Menurut⁷ BPS, Produk Domestik Bruto didefinisikan seperti jumlah keseluruhan dari barang atau jasa yang telah mampu diciptakan oleh suatu negara pada waktu tertentu, yaitu jumlah produk domestik ditambah dengan berbagai faktor produksi (tenaga kerja dan modal yang dipakai) yang dimiliki oleh penduduk Indonesia maupun dari luar negeri, dikurangi dengan pendapatan yang dimiliki oleh penduduk asing yang mendapatkannya di Indonesia. PDB pada harga nominal saat ini menunjukkan kapasitas sumber daya ekonomi. Nilai yang tinggi menunjukkan sumber daya ekonomi yang baik dan stabil begitupun sebaliknya.

1.6 Ekspor

Menurut⁸ PP RI nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan, ekspor adalah mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Eksportir adalah perseorangan atau badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan ekspor. Ekspor ialah sejumlah barang dan jasa yang dijual suatu negara ke negara lain pada tahun tertentu, termasuk barang yang bersangkutan, asuransi barang tersebut, dan jasa meliputi proses ekspor.

1.7 Impor

Menurut⁸ PP RI nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan, kegiatan untuk memasukkan suatu barang dari luar negeri ke dalam negeri disebut impor. Importir adalah perseorangan atau badan hukum maupun bukan yang melakukan impor. Namun, jika tinggi impor dan alokasi melampaui, barang maupun jasa serupa di dalam negeri dapat dinonaktifkan. Serta yang terpenting bisa menyerap penerimaan pemerintah, sedangkan dengan impor yang tinggi maka penerimaan PPN dan PPnBM untuk pajak impor juga lebih tinggi. Pada saat impor, terjadi suatu kegiatan di mana barang/jasa atau barang dibeli secara sah ke dalam negeri dari luar negeri dan diimpor sebagai bagian dari proses perdagangan.

1.8 Pengertian Inflasi

Menurut⁹ laman Bank Indonesia, inflasi merupakan terjadinya kenaikan harga kebutuhan barang dan jasa dan terjadi secara terus menerus. Deflasi adalah kebalikan dari inflasi, penurunan harga komoditas secara umum dan terus-menerus. Tidak dapat disebut dengan inflasi jika kenaikan barang terjadi hanya pada beberapa barang kecuali kenaikan itu meluas ke barang-barang lain (atau menyebabkan kenaikan harga). Namun perlu diketahui bahwa, Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan naik turunnya tingkat harga barang kebutuhan. Dengan kata lain, yang dipandang sebagai tingkat harga yang jangkung tidak selalu menunjukkan terjadinya inflasi. Inflasi digunakan sebagai indikator laju perubahan dimana dianggap telah terjadi inflasi apabila proses kenaikan harga berlangsung secara terus menerus dan saling mempengaruhi.

1.9 Pengertian Konsumsi

Konsumsi¹⁰ dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan oleh seseorang yang dilakukan sebagai usaha untuk mengurangi nilai pakai suatu barang kebutuhan. Selanjutnya, tindakan ini juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan individu dan konkurensi. Konsumsi dilakukan oleh seorang individu yang disebut dengan konsumen.

1.10 Pengertian Suku Bunga

Menurut¹¹ laman OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dapat dilihat bahwa suku bunga ialah kompensasi dari untuk nasabahnya yang telah membeli atau menjual produknya. Dua bentuk bunga yaitu bunga pada deposito dan bunga pada pinjaman. Bunga atas tabungan merupakan sejumlah uang wajib dibayarkan bank kepada nasabahnya, sedangkan bunga pinjaman adalah sejumlah uang yang diterima bank dari nasabah. Suku bunga simpanan dan pinjaman sama sama berpengaruh. Tingkat bunga merupakan jumlah yang diberikan oleh

kreditur kepada debitur pinjaman dana atau uang dan biasanya dinyatakan dalam persentase.

1.11 Pengertian Penduduk

Menurut¹² UU RI No. 23 pada Tahun 2006 mengenai pengelolaan kependudukan, penduduk dianggap sebagai warga negara republik Indonesia dan warga negara asing adalah penduduk negara Indonesia. Setiap individu yang tinggal di Indonesia, baik asli bangsa Indonesia atau bukan, dimana undang-undang telah mengesahkan mereka untuk disebut WNI. Penambahan jumlah penduduk yang besar akan mampu meningkatkan tingkat produksi dan memperluas pasar hingga internasional. Kenaikan jumlah penduduk yang berjumlah besar bersama dengan semakin majunya teknologi, bisa membuat perekonomian serta produksi maju. Pertumbuhan penduduk bukan merupakan masalah, namun merupakan sebuah hal positif dalam mendorong upaya membangun ekonomi. Pendapatan yang didapatkan penduduk atas pekerjaannya juga berpengaruh pada jumlah penduduk seiring dengan pertumbuhannya.

METODE PENELITIAN

- A. Metode kualitatif dengan pendekatan asosiatif digunakan dalam penelitian ini.
- B. Keterangan Tempat dan Waktu Penelitian :
 - 1. Dilakukan di Negara Indonesia.
 - 2. Dilakukan pada bulan Desember 2021
- C. Sumber Data dari situs-situs resmi pemerintah, serta jurnal dan artikel mengenai PPN dan PPnBM.
- D. Digunakannya teknik studi dokumentasi pada pengumpulan data, serta pengumpulan, pencatatan, dan pengkajian data sekunder .
- E. Teknik Analisis menggunakan teknik analisis tekstual dengan menganalisis data kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh PKP

Menurut³ UU RI mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah tahun 2009, Pengusaha Kena Pajak (PKP) didefinisikan merupakan kumpulan orang maupun modal yang secara integritas melakukan usaha maupun yang tidak namun melakukan penyerahan barang dan atau jasa yang dikenakan pajak berdasarkan Undang- undang yang berlaku, didalamnya termasuk Pengusaha Kecil yang telah memilih untuk menjadi bagian sebagai Pengusaha Kena Pajak.

PKP bagi para pengusaha memiliki beberapa fungsi diantaranya sebagai pengawasan hak-hak yang dimiliki pengusaha dan kewajiban PKP yang harus dipenuhi di bidang PPN dan PPnBM, sebagai identitas PKP para pengusaha tersebut serta untuk pemenuhan dalam menjalankan kewajiban mengenai PPN dan PPnBM. Kegiatan usaha bagi para pengusaha sebagai syarat agar bisa mengajukan PKP yaitu dengan menghasilkan Barang Kena Pajak (BKP), melakukan impor ataupun ekspor, kegiatan dagang, pemanfaatan, serta usaha dengan memberikan dan memanfaatkan Jasa Kena Pajak (JKP).

Pemungutan PPN dan PPnBM dilakukan selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah penyerahan barang maupun jasa kepada konsumen. Dapat juga ketika pembayaran dilakukan sebelum satu bulan berikutnya atau sebelum barang atau jasa tersebut diserahkan; atau dilakukan bersamaan dengan saat penyerahan barang atau jasa tersebut.¹³

Pengusaha yang telah melakukan pengukuhan sebagai PKP, dapat mendapatkan semua haknya sebagai PKP yaitu dapat melakukan pengkreditan pajak masukan namun tidak dengan pengkreditan PPnBM, atas perolehan barang atau jasa serta dapat melakukan restitusi atau kompensasi atas kelebihan PPN yang pengusaha tersebut bayarkan. Selain itu, PKP juga harus memenuhi kewajibannya yaitu memungut dan melaporkan PPN dan PPnBM terutang tepat waktu serta melaporkan/menyampaikan SPT Masa PPN dan PPnBM yang terutang. Oleh karena itu, banyaknya PKP berpengaruh terhadap jumlah yang diterima negara dari PPN dan PPnBM, dimana semakin banyak jumlah PKP di Indonesia, semakin memberikan pengaruh positif terhadap pemasukan negara yang bersumber dari pungutan pajak, terutama sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

B. Pengaruh PDB

Penerimaan pajak erat kaitannya dengan PDB, karena nilai pajak potensial dipengaruhi oleh PDB, menggambarkan kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia yang sebenarnya. Ketika PDB tumbuh, begitu juga pendapatan pajak. Peningkatan pendapatan per kapita akan diikuti oleh peningkatan daya beli yang berdampak positif terhadap penerimaan PPN dan PPnBM bagi negara. Ketika PDB meningkat, semakin banyak orang yang memiliki pendapatan daripada pendapatan minimum, populasi yang membayar pajak meningkat. Peningkatan PDB dapat memberikan pengaruh terhadap pola konsumsi masyarakat. Peningkatan PDB diiringi dengan peningkatan penerimaan PPN dan PPnBM karena ini sesuai dengan sifat PPN dan PTL, yakni semakin tinggi PDB, maka semakin banyak masyarakat yang mengkonsumsi barang-barang yang dibebaskan dari PPN, selanjutnya semakin tinggi PDB, maka semakin banyak juga masyarakat yang mengkonsumsi barang-barang mewah yang akan dikenakan PPnBM.

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu tertentu oleh suatu negara. Produk domestik bruto (PDB) dianggap sebagai cara terbaik

untuk menilai perkembangan ekonomi suatu negara dalam periode tertentu. Perhitungan ukuran makro ini terpenting dari negara suatu negara. Jumlah konsumsi, nilai investasi/tabungan, serta pengeluaran pemerintah dan ekspor-impor (NX) merupakan komponen PDB yang digunakan untuk mencari nilai PDB.

C. Pengaruh Ekspor

Barang Barang yang bisa diekspor memiliki stok sendiri, tergantung jenis barang yang akan diekspor. Dan tidak semua orang bisa mengekspor, karena terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan ekspor. Ekspor dapat meningkatkan industri dalam negeri karena kegiatan ekspor dapat merangsang permintaan produksi dalam negeri, membuat industri dalam negeri semakin besar dan berkembang. Ekspor juga dapat mengendalikan harga produk, karena ekspor memberikan kesempatan atau tempat bagi suatu negara untuk menggunakan kelebihan produksi barangnya sehingga dapat mengendalikan harga produknya di pasar dalam negeri. Kelebihan barang produksi domestik dapat diekspor ke negara lain yang membutuhkan barang tersebut, sehingga terhindar dari penjualan murah di dalam negeri.

Ekspor berkorelasi positif dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Komponen PDB meliputi jumlah konsumsi, investasi atau tabungan, jumlah belanja serta Ekspor-Import (NX). Konsumsi merupakan keseluruhan jumlah dari berbagai pengeluaran rumah tangga, nilai investasi bisnis, jumlah pengeluaran pemerintah serta ekspor dan impor yang melibatkan sektor eksternal. Jumlah konsumsi, Besarnya investasi, dan besarnya pengeluaran pemerintah disebut permintaan barang domestik dalam negeri, sedangkan nilai ekspor dikurangi dengan nilai impor disebut dengan jumlah ekspor neto. Hal ini berkorelasi positif dengan besarnya pertumbuhan PDB di luar negeri dan dengan jumlah permintaan dari konsumen produk dalam negeri atau ekspor. Pertumbuhan tersebut dapat meningkatkan ekspor dari barang modal dan komoditas negara tersebut karena seiring dengan pertumbuhan produk domestik bruto di luar negeri, kebutuhan dalam negeri seperti investasi meningkat sehingga menyebabkan barang ekspor meningkat. Peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh positif akan peningkatan penerimaan PPN dan PPnBM.

Ekspor adalah bagian dari total pengeluaran, oleh karena itu ekspor bisa memberikan pengaruh pada penerimaan negara yang terealisasi. Jika perdagangan barang dari dalam ke luar negeri ini meningkat, total pengeluaran meningkat dan pendapatan nasional semakin meningkat. Perdagangan ini bermanfaat langsung dan bermanfaat tidak langsung. Secara langsung, perdagangan ini mengarah pada spesialisasi dan ekspor. Barang yang dihasilkan oleh negara sendiri akan lebih murah untuk ditukarkan dengan barang yang diproduksi negara lain dengan harga lebih rendah. Negara memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan

nasionalnya, yang pada gilirannya meningkatkan produksi dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, serta dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang ada. Jika kemiskinan dihilangkan, pendapatan masyarakat meningkat, gaya hidup dan daya beli masyarakat meningkat seperti semula, pendapatan PPN dan PPnBM bagi negara juga akan ikut meningkat. Ekspor juga akan memperluas pasar, dimana pasar domestik biasanya kecil dan tidak dapat menyerap seluruh produksi yang dihasilkan. Kecilnya pasar ini disebabkan oleh pendapatan dan daya beli masyarakat yang sangat rendah dan terbatas. Perdagangan ini memperluas pasar yang ada dan merangsang para investor untuk memutuskan berinvestasi, serta peningkatan pendapatan dan tabungan melalui alokasi yang efisien.¹⁴

D. Pengaruh Impor

Impor mempengaruhi secara signifikan mengenai jumlah pajak yang diterima oleh negara. Rata-rata laju pertumbuhan impor meningkat, meskipun terjadi peningkatan impor yang menurun. Namun, ketika impor digantikan oleh komoditas atau barang modal, ekonomi bergerak, meningkatkan produksi, dengan dan terdorongnya besar PPN dan PPnBM.

E. Pengaruh Inflasi

Tingginya inflasi yang ada dapat mengurangi penerimaan pajak dari suatu daerah. Ketika inflasi terjadi, harga barang biasanya naik yang menyebabkan penurunan permintaan barang. Selanjutnya, perusahaan mengurangi jumlah produk yang dikirim, mengurangi produksi. Hal ini akan mengurangi total pendapatan perusahaan, serta pendapatan masyarakat dari pengurangan penggunaan sumber daya tenaga kerja dari para pekerja. Dimana pada akhirnya, ini akan membawa dampak buruk pada pendapatan bagi bisnis dan masyarakat, yang menyebabkan penurunan pendapatan pajak. Oleh karena itu, inflasi berdampak negatif pada jumlah PPN dan PPnBM yang akan diterima di Indonesia.

F. Pengaruh Konsumsi

Kuatnya angka penerimaan PPN mencerminkan pendapatan dan daya beli dari masyarakat. Namun PPN tidak selalu berkorelasi positif dengan tingkat konsumsi pemerintah. PPN tidak hanya mencerminkan konsumsi, tetapi juga produksi pun tercermin, ini melibatkan pembelian bahan baku maupun barang modal yang turut serta berkontribusi terhadap kenaikan PPN yang terjadi. Artinya hampir seluruh peningkatan jumlah PPN yang diterima pada tahun tersebut muncul akibat proses produksi yang ada. Proses produksi merupakan kegiatan yang didalamnya beberapa faktor produksi yang ada digabungkan untuk terciptanya suatu produk, baik itu barang maupun jasa yang bermanfaat bagi konsumen yang membutuhkannya. Artinya, untuk menjalankan proses tersebut tentu saja dibutuhkan bahan baku dan barang modal, yang dimana dalam pembeliannya turut berkontribusi pada peningkatan penerimaan PPN. Artinya ketika terjadi proses produksi mengalami peningkatan maka penerimaan PPN meningkat.

Namun, tingkat belanja yang dilakukan pemerintah tidak serta merta meningkat. Tingkat konsumsi masyarakat meningkat seiring dengan pembelian atau konsumsi produk oleh masyarakat.

PPN termasuk jenis pajak objektif, jika pajak lain melihat status wajib pajak, berbeda dengan PPN yang hanya berfokus pada benda atau barang yang berhubungan dengan transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli. Jenis pajak ini sangat sering dibayarkan dalam kehidupan sehari-hari, karena menyangkut konsumsi barang dan jasa yang dilakukn sehari-hari, misalnya ketika berbelanja kebutuhan sehari-hari di supermarket dimana selain kita harus membayar barang yang kita beli, kita juga dibebani PPN atas barang tersebut. Daya beli masyarakat dapat digunakan sebagai pembanding untuk jumlah PPN yang diterima, karena PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa oleh masyarakat. Naik dan turunnya daya beli masyarakat seharusnya dapat menginterpretasikan pertumbuhan PPN yang ada. Hal ini berarti jika daya beli masyarakat meningkat itu akan terjadi begitupun dengan PPN, begitupun sebaliknya jika daya beli masyarakat menurun begitupun PPN. Harga bahan baku juga memberikan pengaruh yang besar pada daya beli masyarakat. Ketika harga suatu produk mengalami penurunan, maka permintaan dari masyarakat terhadap produk tersebut akan meningkat. Sebaliknya, ketika harga komoditas mengalami kenaikan, permintaan masyarakat terhadap komoditas tersebut akan mengalami penurunan.¹⁵

G. Pengaruh Jumlah Penduduk

Pertumbuhan penduduk ialah keseimbangan yang baik dan teratur antara penambah atau pengurang dari keseluruhan penduduk. Jumlah kelahiran, dan juga akan dikurangi oleh banyaknya kematian yang dapat terjadi pada semua kelompok umur akan mempengaruhi perkembangan penduduk. Jumlah penduduk juga dapat dipengaruhi oleh mobilitas penduduk yang melakukan imigrasi. Jumlah penduduk bias menjadi hal yang positif, karena subjek pembangunan dapat terlihat, selain itu perekonomian akan berkembang dikarenakan banyaknya tenaga kerja. Namun, disisi lain pemenuhan kebutuhan meningkat seiring dengan perkembangan jumlah penduduk. Permasalahan timbul di bidang kependudukan mengenai persebaran penduduk yang tidak merata, kualitas penduduk yang kurang, ketidakcukupan konsumsi yang dibutuhkan, struktur penduduk yang kurang produktif, modal serta teknologi belum memadai, kepemilikan rendah sehingga daya produksi tenaga kerja menurun, begitu pula masalah fundamental terkait ketenagakerjaan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) termasuk dalam jenis pajak konsumsi dan memiliki sifat yang hampir sama, namun ada sedikit perbedaan, yaitu PPN yang dipungut per rantai produksi dan distribusi sedangkan PPnBM

hanya dipungut satu kali, yaitu pada saat pemasukan atau penyerahan Barang Kena Pajak (Barang Kena Pajak) yang tergolong mewah oleh Pengusaha Kena Pajak. Selain itu PPN dapat dikreditkan, sedangkan PPnBM tidak. Tidak semua barang yang dikenakan PPN akan dikenakan pula PPnBM namun hanya barang yang tergolong mewah yang termasuk dalam PPnBM.¹⁶

H. Pengaruh Suku Bunga

Suku Suku bunga merupakan alat konvensional pengendali dan penekan inflasi. Dimana semakin tinggi suku bunga, maka semakin terdorong masyarakat untuk berinvestasi di bank daripada berinvestasi di sektor manufaktur yang berisiko lebih besar dibandingkan jika mereka menginvestasikan uangnya di bank. Suku bunga yang tinggi dapat menyerap uang yang beredar di masyarakat umum. Namun di sisi lain, juga terjadi peningkatan nilai uang dan juga tercipta biaya peluang di sektor industri atau di sektor riil. Suku bunga umumnya naik selama periode inflasi, yang mencerminkan fakta bahwa daya beli uang menurun ketika harga naik. Untuk menghitung pendapatan bunga dalam hal barang dan jasa riil, kami menggunakan tingkat bunga. Kondisi makro ekonomi negara dapat mempengaruhi penerimaan pajak negara. Fluktuasi yang terjadi dapat berdampak negatif pada kegiatan ekonomi. Jika gejolak ekonomi terus berlanjut pada tingkat konsumsi, tingkat investasi, serta ekspor-impor yang akan mengalami penurunan, yang juga akan berdampak pada penerimaan PPN. Selain pasar uang, suku bunga juga mempengaruhi permintaan barang dan jasa dari konsumen. Suku bunga yang lebih tinggi akan membawa biaya pinjaman dan pengembalian tabungan lebih tinggi dari sebelumnya. Pada kasus sedikitnya sektor rumah tangga melakukan peminjaman uang untuk membeli rumah baru, disisi lain peminjam uang untuk pembelian rumah yang lebih kecil akan menjadi pengurang permintaan untuk investasi rumah. Selain itu, perusahaan peminjam uang sebagai upaya pembangunan pabrik baru akan sebagai pengurang nilai investasi dalam bisnis.

Berkurangnya permintaan barang dan jasa dari konsumen dapat mempengaruhi penerimaan pajak, tingkat bunga yang ada juga dapat sebagai pengaruh penerimaan pajak. ketika suku bunga bank mengalami kenaikan, maka orang akan memilih uangnya untuk ditabung dibanding diinvestasikan. Pemburukan ekonomi dapat tercermin dari kampanye melikuidasi investor reksa dana akibat kenaikan suku bunga bank. Menurunnya investasi memperlambat laju pertumbuhan pada ekonomi karena pendapatan dari masyarakat ikut turun, begitu pula pajak penghasilan. Berkurangnya pendapatan masyarakat mengurangi daya beli masyarakat, yang berdampak pada pendapatan perusahaan dari barang atau jasa yang disediakan. Suku bunga berpengaruh buruk pada penerimaan pajak. Selain itu, juga mempengaruhi pajak penghasilan, ketika suku bunga mengalami kenaikan, orang cenderung akan melakukan pengurangan investasi dan memilih melakukan penyimpanan uang di bank. Turunnya investasi akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi karena pendapatan akan

turun. Rendahnya pendapatan masyarakat menurunkan daya beli masyarakat, yang mempengaruhi pendapatan perusahaan penghasil barang, maka juga pajak yang diterima akan terpengaruh.

Suku bunga mempengaruhi pajak karena jika suku bunga mengalami kenaikan, orang akan melakukan pengurangan investasi mereka dan memilih melakukan penyimpanan uang di bank. Turunnya investasi memperlambat laju pertumbuhan ekonomi, seiring dengan menurunnya pendapatan masyarakat, begitu pula dengan bagian pendapatan dari pajak penghasilan. Floating rate berpengaruh buruk dan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Dapat disimpulkan bahwa suku bunga mempengaruhi keputusan untuk melakukan pembelanjaan lebih banyak uang atau memilih untuk menyimpan uangnya di tabungan. Di satu sisi, suku bunga yang tinggi akan digunakan sebagai penambah minat masyarakat untuk menambah tabungannya sehingga besar uang di bank bertambah, sementara itu juga akan menurunkan minat masyarakat untuk melakukan investasi. Di sisi lain, persen suku bunga yang rendah akan meningkatkan dorongan dan minat masyarakat untuk berinvestasi, start-up atau hal sejenis yang digunakan sebagai peningkat pajak yang diterima, terutama PPN yang terdapat pada pembelian produk hasil manufaktur maupun yang masih berupa bahan baku.

I. Pengaruh Seluruh Variabel Secara Bersamaan Terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM

PKP harus jelas dan tidak ambigu sebagai kriteria yang dasar dalam pengenaan pajak. Dalam peraturan PPN, persekutuan dan persekutuan dianggap sebagai PKP selama menjalankan kegiatan ekonomi. Namun, ada juga yang mengizinkan atau mewajibkan setiap cabang perusahaan dianggap sebagai PKP yang terpisah. Selanjutnya PDB merupakan variabel tidak langsung dan telah ditentukan oleh perumusan peraturan. Hal ini berakibat hanya satu variabel yang dipengaruhi secara langsung oleh peraturan perundang-undangan, yaitu PPN. Variabel penerimaan PPN terdiri dari subjek, objek dan tarif yang diatur dalam peraturan perpajakan. Subyek dan objek disini adalah barang/jasa yang dapat dikenakan PPN. Penanggung jawab PPN, yaitu PKP yang menjadi pemungut PPN, dan juga penentu besarnya penerimaan PPN. Semakin banyak jumlah pengusaha yang dikukuhkan sebagai wajib pajak maka juga akan sebagai peningkat penerimaan PPN.

Ekspor ialah salah satu faktor yang penting dalam pendorong pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Kegiatan ekspor adalah suatu sistem perdagangan melalui perdagangan dari daerah satu ke daerah lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peningkatan ekspor akan meningkatkan produk domestik bruto (PDB) regional dan akan menjadi indikator peningkatan PDB. Pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh signifikan kepada besarnya realisasi akhir

penerimaan PPN dan PPnBM, sedangkan inflasi tidak memiliki pengaruh yang baik terhadap realisasi penerimaan PPN dan PPnBM. Perubahan perilaku masyarakat dalam berkonsumsi dan banyaknya barang yang tersedia untuk para masyarakat atau konsumen terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ini juga merupakan pajak yang dipungut atas barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat di dalam daerah pabean. Peran dari adanya PPN dianggap penting bagi tersedianya penerimaan negara karena merupakan penyumbang terbesar kedua untuk jenis pajak. Kenaikan basis PPN akan berdampak pada peningkatan PPN yang diterima. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa inflasi memberikan pengaruh yang baik terhadap realisasi PPN yang akan diterima.

Penerimaan pajak suatu negara dipengaruhi oleh laju inflasi. Inflasi membuat harga barang naik lebih dari biasanya dan terjadi terus menerus, hal ini memicu turunnya permintaan barang dari para konsumen karena mereka tidak dapat menerima tingginya harga barang tersebut. Kemudian, perusahaan mengurangi jumlah produk yang dipasok, mengurangi jumlah produksi. Hal ini akan menyebabkan penurunan pendapatan total perusahaan dan masyarakat umum karena hal ini menurunkan kebutuhan tenaga kerja dari para pengusaha. Hal ini akan memicu penurunan pendapatan baik bagi perusahaan maupun masyarakat, begitupun penerimaan dari sektor pajak bagi negara. Suku bunga memberikan efek buruk terhadap penerimaan PPN, karena jika suku bunga tinggi maka masyarakat akan memilih untuk menyimpan uangnya di bank, karena keuntungannya lebih besar. Hal ini membuat kebutuhan likuiditas masyarakat menjadi lebih berkurang karena mereka lebih memilih mengalokasikannya dalam tabungan. Saat aktivitas konsumen berkurang, uang yang beredar pun akan sedikit. Penurunan konsumsi berakibat pada berkurangnya PPN karena PPN ialah pajak atas konsumsi. Inflasi dan suku bunga yang ada dapat mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai. Inflasi memiliki pengaruh yang buruk dan besar terhadap penerimaan PPN, oleh karena itu untuk menjaga penerimaan PPN, pemerintah harus menjaga tingkat inflasi yang stabil agar dapat mencegah penurunan penerimaan PPN. Selain itu untuk pola konsumsi masyarakat juga penting sebagai usaha untuk tidak mengurangi penerimaan PPN. Tingkat inflasi memiliki pengaruh yang besar terhadap penerimaan PPN, oleh karena itu untuk menjaga penerimaan PPN, pemerintah harus menjaga tingkat inflasi yang stabil supaya meminimalkan penurunan penerimaan PPN. Selain itu untuk menjaga stabilitas suku bunga guna menjaga pola konsumsi masyarakat agar tidak mengurangi penerimaan PPN. Selain itu sebagai usaha agar stabilitas suku bunga tetap terjaga guna menjaga pola konsumsi masyarakat agar tidak mengurangi penerimaan PPN.

Peningkatan jumlah penduduk berdampak positif terhadap pendapatan daerah yang diterima apabila penduduk produktif dan membayar pajak yang dipungut oleh pemerintah

dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Di sini pemerintah harus meningkatkan dana bantuan bagi masyarakat miskin agar pengeluaran pemerintah bagi masyarakat melalui bantuan sosial meningkat, sedangkan pajak dipungut tidak ideal karena banyak masyarakat miskin yang tidak dapat membayar pajak akibat pendapatan yang cukup rendah. Banyaknya PKP, Nilai PDB, Nilai ekspor, Nilai inflasi, Besar suku bunga BI serta besarnya belanja konsumen dapat membeikan pengaruh terhadap penerimaan PPN. PDB, inflasi, pengangguran dan impor mempengaruhi penerimaan pajak. Nilai Inflasi, besar tukar rupiah serta nilai PKP mempengaruhi PPN yang diterima. Dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian antara hasil survei, teori opini dan survei sebelumnya yaitu Banyaknya pengusaha yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak, nilai Produk Domestik Bruto, nilai ekspor dan impor, tingginya inflasi, besarnya konsumsi masyarakat, tingkat persen bunga serta banyaknya jumlah penduduk secara simultan mempengaruhi pajak baik dari barang yang termasuk BKP secara umum maupun barang yang tergolong mewah tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pajak Pertambahan Nilai yang penerapannya diatur dalam³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah, perubahan terakhirnya yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM sebagai antisipasi kondisi perekonomian di masa mendatang, perlu melakukan langkah untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem penatausahaan PPN, serta perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga menjaga unsur keadilan bagi semuanya, unsur kemudahan dalam menjalankan, kepastian hukum bagi yang melanggar, dan asas yang sesuai. Namun Pajak Pertambahan Nilai berbeda dengan pajak yang ditujukan pada barang mewah. PPnBM adalah jenis pajak yang tidak terlalu dikenal di kalangan masyarakat umum. Hal ini mungkin diakibatkan oleh sifat PPnBM itu sendiri yang adalah pungutan tambahan yang dipungut sekali, yaitu ketika pemasukan serta penyerahan oleh Pengusaha Kena Pajak dalam produksi. Selain itu, prosedur tidak ditetapkan untuk pajak produksi maupun pajak penghasilan. PPnBM yang dibebankan kepada pemasok akan dimasukkan dalam harga pokok barang kena pajak yang tergolong mewah. Oleh karena itu, sebagian pelanggan yang mengonsumsi barang mewah kena pajak tidak menyadarinya.

Variabel - variabel yang mempengaruhi adopsi PPN serta PPnBM antara lain banyaknya PKP, nilai Produk Domestik Bruto yang ada, nilai ekspor dan impor, tingginya inflasi, besarnya konsumsi masyarakat, persen suku bunga, serta banyaknya jumlah penduduk. Disini dapat disimpulkan bahwa jumlah PKP yang tinggi akan memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan PPN dan PPnBM. PDB memiliki pengaruh positif atas PPN dan PPnBM yang diterima negara. Selain itu, Ekspor juga memiliki efek yang baik dan signifikan atas PPN dan PPnBM. Impor memberi efek yang signifikan terhadap penerimaan PPN serta PPnBM. Sedangkan Inflasi tidak mempengaruhi PPN dan PPnBM secara signifikan dan positif. Ekspor memberikan pengaruh positif karena ekspor merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan suatu daerah. Impor berpengaruh signifikan atas PPN dan PPnBM. Inflasi memiliki pengaruh yang sangat negatif terhadap penerimaan PPN dan PPnBM, karena naiknya inflasi akan membuat kenaikan harga barang dan jasa dipasaran, artinya PPN juga akan mengalami kenaikan positif. Konsumsi memberikan pengaruh yang positif terhadap penerimaan negara dari sektor PPN dan PPnBM. Besarnya suku bunga dapat mengurangi penerimaan pajak karena pada saat suku bunga tinggi masyarakat akan lebih memilih menabungkan uangnya di bank karena masyarakat mengharapkan keuntungan yang lebih. Jumlah penduduk juga berpengaruh positif terhadap PPN dan PPnBM jika penduduk suatu negara selalu produktif sehingga dapat membayar pajak atau bea masuk yang dipungut. Serta banyaknya jumlah PKP, besarnya PDB, Nilai ekspor dan impor yang ada, inflasi yang terjadi, serta besarnya konsumsi, nilai suku bunga serta besarnya jumlah penduduk yang ada secara bersamaan memberikan efek yang lebih signifikan secara bersamaan dibandingkan satu persatu variabelnya.

Saran

1. Ketentuan perpajakan yang dibuat harus secara khusus, jelas, dan mengikat.
2. Fasilitas PPN harus diberikan untuk mendorong pembangunan nasional dengan mendukung ketersediaan barang-barang strategis, seperti:
 - Fasilitas dibebaskan dari PPN
 - Fasilitas tidak dikenakan PPN
3. Dalam rangka mendukung pengembangan usaha dan peningkatan daya saing dengan menjamin ketersediaan barang strategis, pemerintah perlu memberikan fasilitas pembebasan atas impor maupun penyediaan barang yang masuk sebagai objek pajak tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Kebijakan Fiskal. Badan Kebijakan Fiskal - Detail Fiskalpedia.

<https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/07/13/173618726358430-pajak-pertambahan-nilai-ppn> (2019).

Djufri, M. Berita - SUDAH SAATNYA PAJAK BUKAN LAGI BERSIFAT MEMAKSA.

<https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-pajak-sudah-saatnya-pajak-bukan-lagi-bersifat-memaksa-2019-11-05-362a0e76/> (2014).

Direktorat /Jendral pajak. Undang-Undang Pajak Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 2009. 1–477 (2009).

Bayu. Mengenal Secara Singkat: Pengertian, Objek, dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). <https://konsultanku.co.id/blog/mengenal-secara-singkat-pengertian-objek-dan-tarif-pajak-pertambahan-nilai-ppn> (2021).

Indonesia, M. K. R. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18 /PMK.03/2021 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, PPN, Dan PPnBM Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2021).

Direktorat /Jendral pajak. Pengusaha Kena Pajak | Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/pengusaha-kena-pajak> (2021).

Statistik, B. P. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/subject/11/produk-domestik-bruto--lapangan-usaha-.html> (2021).

Perpres RI No.29. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. 4 (2021).

Bank Indonesia. Inflasi. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/inflasi/default.aspx> (2021).

Ahmad. Pengertian Konsumsi: Fungsi, Ciri Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya - Gramedia Literasi. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-konsumsi/>.

OJK. Mengenal Jenis-jenis Suku Bunga Bank :: SIKAPI :: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20649>.

Indonesia, U.-U. R. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Administrasi Kependudukan. *Vasc. Embolotherapy* 107–118 (2006).

Prabowo, R. G. M. MEKANISME PPN DAN PPnBM. (2019) doi:10.31227/osf.io/shqmg.

Ismail, I. Pengertian Ekspor dan Impor: Tujuan, Manfaat, dan Komoditasnya - Accurate Online. <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pengertian-ekspor-dan-impor/> (2020).

Hamid, J. Hubungan Penerimaan PPN dan Tingkat Konsumsi Masyarakat. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/hubungan-penerimaan-ppn-dan-tingkat-konsumsi-masyarakat/> (2019).

Masdi, A. Menakar Penerimaan Pajak di Tahun Pandemi. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menakar-penerimaan-pajak-di-tahun-pandemi/> (2021).